

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis framing model Robert N. Entman terhadap pemberitaan di Kompas.com mengenai polemik beasiswa LPDP pada Februari 2026, penelitian ini menyimpulkan empat poin utama sebagai berikut:

Pendefinisian Masalah (*Define Problems*): Kompas.com membingkai kontroversi privilese oknum alumni elit sebagai pemantik yang mempertegas isu eksklusivitas dan ketimpangan akses beasiswa. Masalah didefinisikan bukan sekadar skandal personal, melainkan indikasi pergeseran dana abadi pendidikan yang terkesan tidak sesuai tujuan awal pembentukannya sehingga merugikan kelompok non-elit.

Perkiraan Penyebab (*Diagnose Causes*): Krisis kepercayaan publik ini dibingkai mencuat akibat adanya perpaduan antara blunder personal oknum yang diperparah oleh celah struktural pada sistem pengawasan pemerintah. Tidak adanya desain peta jalan kontribusi alumni yang jelas membuat fungsi monitoring pascastudi menjadi rapuh dan gagal memberikan solusi ketimpangan bagi masyarakat bawah.

Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*): Pengabaian tanggung jawab moral oleh oknum alumni elit dinilai mencederai esensi inklusivitas dan asas keadilan distributif. Narasi arogansi pamer privilese tersebut mendapat penghakiman moral karena memicu kesan perpecahan kelas sosial, di mana beasiswa yang dibiayai dana publik justru dicitrakan hanya memberikan keuntungan sepihak bagi kelompok eksklusif saja.

Saran Penyelesaian (*Suggest Remedies*): Media menekankan perlunya penegakan sanksi finansial dan ganti rugi tegas yang mengikat pada individu maupun keluarga oknum demi memulihkan asas keadilan. Solusi ini dibarengi dengan desakan perbaikan menyeluruh pada sistem tata kelola dan akuntabilitas LPDP guna membersihkan kesan eksklusivitas beasiswa di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa *Kompas.com* secara konsisten memosisikan dirinya sebagai pengawal akuntabilitas dana publik melalui pembingkaihan yang mengedepankan nilai keadilan distributif. Media tidak hanya memotret kegaduhan di ruang siber, melainkan mengonstruksi wacana bahwa tantangan terbesar beasiswa LPDP saat ini adalah memulihkan kembali marwah inklusivitas agar tidak terjebak menjadi instrumen elitis yang melanggengkan ketimpangan akses bagi kelompok sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan media mencerminkan urgensi rekonstruksi sistemik yang tidak hanya bersifat menghukum oknum, tetapi juga memperkuat fundamental inklusivitas program beasiswa jangka panjang tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa dalam isu sensitif yang melibatkan dana publik, media massa memiliki peran vital sebagai *watchdog* yang mampu menjembatani diskursus antara hak profesional individu dan tanggung jawab moral terhadap negara.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Saran akademis dalam penelitian ini ditujukan untuk pengembangan studi di masa mendatang, terutama bagi peneliti yang tertarik mengeksplorasi kajian *framing* media.

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan pembingkaihan antara media arus utama (*mainstream*) seperti *Kompas.com* dengan narasi yang berkembang murni di media sosial, seperti X (*Twitter*) atau *TikTok*. Hal ini penting untuk melihat secara komprehensif bagaimana dinamika *intermedia agenda-setting* atau saling memengaruhi antara agenda pemberitaan media formal dengan wacana publik yang cair di ruang siber.
2. Peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metodologi kualitatif lain, seperti Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan model Norman Fairclough atau Teun A. van Dijk. Penggunaan model tersebut akan memungkinkan peneliti untuk membedah lebih dalam aspek relasi kuasa, hegemoni, serta ideologi kelas yang bekerja secara sistemik di balik

isu ketimpangan akses pendidikan tinggi, sehingga fenomena elitisme beasiswa tidak hanya dipahami dari sisi pemingkakan media, melainkan dari struktur sosial-politik yang membentuknya.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis dalam penelitian ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait agar dapat mengoptimalkan pengelolaan serta pemberitaan mengenai program beasiswa negara.

1. Bagi pengelola beasiswa yaitu LPDP, Berdasarkan temuan analisis mengenai ketimpangan akses dan kebutuhan sistemik, penelitian ini merekomendasikan agar pihak LPDP mempertimbangkan pendekatan pengelolaan berbasis sistem monitoring pascastudi yang transparan, sebagai alternatif dari kebijakan penyetatan yang bersifat reaktif.
2. Bagi praktisi media, diharapkan untuk tetap mempertahankan prinsip pelaporan dua sisi (*cover both sides*) yang berimbang, sehingga mampu mengedukasi masyarakat dengan baik terkait dengan pemberitaan mengenai pendanaan beasiswa oleh LPDP. Prinsip ini menjadi krusial agar media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan objektif.